

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Dasar Sustainability Report

Laporan keberlanjutan merupakan bentuk tanggung jawab yang dinyatakan secara formal oleh suatu perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dokumen ini menjadi bukti komitmen perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis, sekaligus menunjukkan sejauh mana komitmen tersebut telah diimplementasikan secara nyata dalam kegiatan usaha sehari-hari (*Global Reporting Initiative 2021*).

Gagasan dasar dari pelaporan keberlanjutan berakar pada perubahan paradigma dalam menilai kesuksesan sebuah entitas bisnis. Jika dahulu kinerja perusahaan hanya diukur dari segi keuntungan finansial semata, kini keberhasilan tersebut juga dilihat dari kemampuannya dalam menjaga harmoni antara pencapaian ekonomi, kontribusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Pandangan ini selaras dengan konsep *triple bottom line* yang dikemukakan oleh Elkington (1997), yang menempatkan tiga elemen penting *profit* (keuntungan), *people* (masyarakat), dan *planet* (lingkungan) sebagai tolak ukur utama dalam keberhasilan suatu bisnis secara menyeluruh.

Keberadaan *Sustainability Report* memiliki nilai strategis yang signifikan. Selain berfungsi sebagai sarana komunikasi eksternal dengan para pemangku kepentingan, laporan ini juga memainkan peran penting secara internal sebagai alat evaluasi kebijakan dan program keberlanjutan yang telah dijalankan perusahaan. Melalui penyajian informasi yang terbuka, objektif, dan terukur, perusahaan memberikan kesempatan bagi investor, konsumen, regulator, hingga masyarakat luas untuk menilai sejauh mana praktik bisnis yang dijalankan telah mencerminkan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan (KPMG, 2022).

Di tingkat global, Global Reporting Initiative (GRI) telah mengembangkan seperangkat standar yang menjadi rujukan utama dalam pelaporan keberlanjutan lintas sektor industri. Standar ini memberikan panduan komprehensif mengenai berbagai indikator yang perlu diungkapkan, mencakup dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tujuan utama dari penerapan GRI adalah menciptakan keseragaman pelaporan, serta meningkatkan mutu, keterbandingan, dan kredibilitas informasi non-keuangan yang disampaikan kepada publik (GRI, 2021).

Adapun di Indonesia, komitmen terhadap pelaporan keberlanjutan diperkuat melalui diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017. Peraturan ini mengatur tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, dan mewajibkan penyusunan laporan keberlanjutan secara berkala. POJK 51 tidak hanya menegaskan pentingnya mengintegrasikan isu lingkungan dan sosial ke dalam aktivitas bisnis, tetapi juga mengukuhkan kedudukan sustainability report sebagai bagian dari praktik tata kelola perusahaan yang baik (OJK, 2017).

Dapat disimpulkan bahwa laporan keberlanjutan tidak sekadar menjadi dokumen administratif yang disusun untuk memenuhi kewajiban regulasi, melainkan merupakan refleksi nyata dari tanggung jawab perusahaan atas dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat. Lebih jauh lagi, penyusunan laporan ini menandai pergeseran pendekatan bisnis dari orientasi konvensional yang semata mengejar keuntungan, menuju paradigma bisnis berkelanjutan yang menjunjung tinggi

keseimbangan antara kinerja finansial dan komitmen terhadap keberlanjutan sebagai landasan utama dalam proses pengambilan keputusan strategis.

2.2. Regulasi dan Standar

Dalam proses penyusunan laporan keberlanjutan, perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia merujuk pada sejumlah regulasi serta standar yang berlaku, baik di lingkup nasional maupun internasional. Dua acuan utama yang menjadi landasan dalam praktik pelaporan keberlanjutan tersebut adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 serta Standar *Global Reporting Initiative (GRI Standards)*.
Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017

POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan pada Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik diterbitkan sebagai upaya regulatif untuk mendorong integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam sistem bisnis nasional. Regulasi ini mewajibkan entitas yang tercakup untuk menyusun dan mempublikasikan laporan keberlanjutan setiap tahun, baik dalam bentuk laporan yang terpisah maupun yang terintegrasi dengan laporan tahunan perusahaan.

Isi dari laporan tersebut harus memuat kinerja perusahaan dalam tiga dimensi utama, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di samping itu, perusahaan juga diminta untuk menjelaskan strategi, kebijakan, serta dampak dari aktivitas usahanya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Regulasi ini tidak hanya mengatur aspek teknis pelaporan, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas, keterbukaan informasi, serta partisipasi pemangku kepentingan sebagai unsur krusial dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang berorientasi pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Global Reporting Initiative (GRI Standards)

Global Reporting Initiative (GRI) merupakan lembaga independen yang merancang dan mengembangkan standar pelaporan keberlanjutan yang bersifat global serta dapat digunakan lintas sektor industri. *GRI Standards* telah diakui secara luas sebagai kerangka rujukan utama dalam penyusunan laporan keberlanjutan karena menyediakan pedoman yang sistematis, komprehensif, dan konsisten dalam menyampaikan informasi non-keuangan.

Struktur *GRI Standards* terbagi ke dalam tiga bagian utama, yakni:

- GRI 1: Foundation, yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar dan kerangka umum pelaporan.
- GRI 2: *General Disclosures*, yang mencakup informasi mengenai profil organisasi, struktur kepemimpinan dan tata kelola, serta nilai-nilai perusahaan.
- GRI 3: Material Topics, yang menekankan pendekatan identifikasi dan pengelolaan isu-isu material yang relevan bagi perusahaan dan pemangku kepentingan.

Selain standar umum tersebut, GRI juga menawarkan standar topikal yang secara lebih spesifik membahas kinerja pada bidang tertentu, seperti ekonomi (contohnya GRI 201 tentang Economic Performance), lingkungan (misalnya GRI 305 mengenai Emissions), serta sosial (seperti GRI 401 tentang *Employment*).

Implementasi *GRI Standards* memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan laporan keberlanjutan yang tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara internal, tetapi juga dapat dibandingkan secara eksternal antar entitas. Hal ini pada gilirannya meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap kredibilitas informasi yang disampaikan serta mendorong praktik bisnis yang lebih transparan dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

2.3. Indikator Pengungkapan dalam Sustainability Report

Tabel 2. 1 Standar POJK No. 51/POJK.03/20

Keterangan	Kode	Informasi	Keterangan
Penjelasan strategi berkelanjutan	A.1		Sosial
Ikhtisar kinerja aspek ekonomi	B.1a	Kuantitas produksi atau jasa yang dijual	Ekonomi
	B.1b	Pendapatan atau penjualan	Ekonomi
	B.1c	Laba atau rugi bersih	Ekonomi
	B.1d	Produk ramah lingkungan	Ekonomi
	B.1e	Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis keuangan berkelanjutan	Ekonomi
Ikhtisar kinerja aspek lingkungan hidup	B.2a	Penggunaan energi (antara lain listrik dan air)	Lingkungan
	B.2b	Pengurangan emisi yang dihasilkan	Lingkungan
	B.2c	Pengurangan limbah dan efluen (limbah yang telah memasuki lingkungan) yang dihasilkan	Lingkungan
	B.2d	Pelestarian keanekaragaman hayati	Lingkungan
Ikhtisar kinerja aspek sosial	B.3	Uraian mengenai dampak positif dan negatif dari penerapan keuangan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan	Sosial
Profil Singkat Emiten	C.1	Visi, misi, dan nilai keberlanjutan	Ekonomi
	C.2	Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimil, alamat email, dan situs web, serta kantor cabang dan/atau kantor perwakilan	Ekonomi
	C.3a	Skala usaha: total aset atau kapitalisasi aset, dan total kewajiban	Ekonomi
	C.3b	Skala usaha: jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan	Sosial
	C.3c	Skala usaha: nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham	Ekonomi

Keterangan	Kode	Informasi	Keterangan
	C.3d	Skala usaha: wilayah operasional	Sosial
	C.4	Penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan	Ekonomi
	C.5	Keanggotaan pada asosiasi	Sosial
	C.6	Perubahan emiten dan perusahaan publik yang bersifat signifikan, antara lain terkait penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan	Ekonomi
Penjelasan Direksi	D.1a(1)	Kebijakan: penjelasan nilai keberlanjutan	Ekonomi
	D.1a(2)	Kebijakan: penjelasan respon emiten terhadap isu terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan	Ekonomi
	D.1a(3)	Kebijakan: penjelasan komitmen pimpinan emiten dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan;	Ekonomi
	D.1a(4)	Kebijakan: pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan	Ekonomi
	D.1a(5)	Kebijakan: tantangan pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan.	Ekonomi
	D.1b(1)	Penerapan Keuangan Berkelanjutan: pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup) dibandingkan dengan target	Ekonomi
	D.1b(2)	penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan (bagi LJK yang diwajibkan membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan).	Ekonomi

Keterangan	Kode	Informasi	Keterangan
	D.1c(1)	Strategi pencapaian target: pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup;	Ekonomi
	D.1c(2)	Strategi pencapaian target: pemanfaatan peluang dan prospek usaha	Ekonomi
	D.1c(3)	Strategi pencapaian target: penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan emiten	Ekonomi
Tata Kelola Keberlanjutan	E.1	Uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.	Ekonomi
	E.2	Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.	Ekonomi
	E.3a	Penilaian risiko atas penerapan keuangan berkelanjutan: Penjelasan mengenai prosedur dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan usaha keberlanjutan terkait aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial	Ekonomi

Keterangan	Kode	Informasi	Keterangan
	E.3b	Penilaian risiko atas penerapan keuangan berkelanjutan: Penjelasan peran anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko yang dijalankan oleh Emiten dan Perusahaan Publik.	Ekonomi
	E.4a	Pemangku kepentingan: keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian (assessment) manajemen, RUPS, surat keputusan atau lainnya	Ekonomi
	E.4b	Pemangku kepentingan: pendekatan yang digunakan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain dalam bentuk dialog, survei, dan seminar.	Ekonomi
	E.5	Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.	Ekonomi
Kinerja Keberlanjutan	F.1	Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.	Ekonomi
	F.2	Kinerja ekonomi (3 tahun): perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi dalam hal Laporan Keberlanjutan disusun secara terpisah dengan Laporan Tahunan	Ekonomi

Keterangan	Kode	Informasi	Keterangan
	F.3	Kinerja ekonomi (3 tahun): perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan.	Ekonomi
	F.4	Biaya Lingkungan Hidup	Ekonomi
	F.5	Aspek Material: Penggunaan material yang ramah lingkungan	Lingkungan
	F.6	Aspek Energi: Jumlah dan intensitas energi yang digunakan	Lingkungan
	F.7	Aspek Energi: Upaya dan pencapaian efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan	Lingkungan
	F.8	Aspek air: penggunaan air	Lingkungan
	F.9	Aspek keanekaragaman hayati: Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati	Lingkungan
	F.10	Aspek keanekaragaman hayati: usaha konservasi keanekaragaman hayati	Lingkungan
	F.11	Aspek emisi: jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya	Lingkungan
	F.12	Aspek emisi: upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan	Lingkungan
	F.13	Aspek limbah dan efluen: jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis	Lingkungan
	F.14	Aspek limbah: mekanisme pengelolaan limbah dan efluen	Lingkungan
	F.15	Aspek limbah: tumpahan yang terjadi (jika ada)	Lingkungan
	F.16	Aspek pengaduan terkait lingkungan hidup: Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan	Lingkungan

Keterangan	Kode	Informasi	Keterangan
	F.17	Kinerja sosial (3 tahun): Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen.	Sosial
	F.18	Aspek ketenagakerjaan: kesetaraan kesempatan bekerja	Sosial
	F.19	Aspek ketenagakerjaan: tenaga kerja anak dan tenaga kerja paksa	Sosial
	F.20	Aspek ketenagakerjaan: upah minimum regional	Sosial
	F.21	Aspek ketenagakerjaan: lingkungan bekerja yang layak dan aman	Sosial
	F.22	Aspek ketenagakerjaan: pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai	Sosial
	F.23	Aspek masyarakat: dampak operasi terhadap masyarakat sekitar	Sosial
	F.24	Aspek masyarakat: pengaduan masyarakat	Sosial
	F.25	Aspek masyarakat: kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL)	Sosial
	F.26	Tanggung jawab pengembangan produk/jasa berkelanjutan: inovasi dan pengembangan produk/jasa keuangan berkelanjutan	
	F.27	Tanggung jawab pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan: jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan;	

Keterangan	Kode	Informasi	Keterangan
	F.28	Tanggung jawab pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan: dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif;	Ekonomi
	F.29	Tanggung jawab pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan: jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya	Ekonomi
	F.30	Tanggung jawab pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan: survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan.	Ekonomi
Lain-lain	G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada)	Sosial
	G.2	Lembar umpan balik	Sosial
	G.3	Tanggapan terhadap umpan balik laporan keberlanjutan tahun sebelumnya	Sosial
	G.4	Daftar pengungkapan sesuai POJK 51/POJK.03/2017	Ekonomi

Sumber: OJK 2017

2.4. Corporate Social Responsibility (CSR)

Tanggung jawab sosial perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*, merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk menjalankan praktik usaha yang etis, sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Komitmen ini diwujudkan melalui upaya peningkatan kualitas hidup para karyawan, masyarakat sekitar, dan komunitas yang lebih luas. CSR menggambarkan kesadaran perusahaan dalam menyeimbangkan orientasi keuntungan ekonomi dengan kepedulian terhadap aspek sosial dan pelestarian lingkungan hidup.

Sebagaimana dinyatakan oleh Kotler dan Lee (2005), "*Corporate Social Responsibility is a commitment to improve community well-being through discretionary business practices and contributions of corporate resources.*" Pernyataan ini menegaskan bahwa CSR bukan sekedar bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan langkah sukarela dari perusahaan untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan melalui praktik usaha yang bertanggung jawab.

Dalam kerangka pelaporan keberlanjutan, praktik CSR menjadi salah satu komponen penting yang harus disampaikan secara terbuka dan terstruktur. Informasi terkait CSR dalam *Sustainability Report* mencerminkan sejauh mana perusahaan telah menjalankan program-program sosial dan lingkungan sebagai bagian dari strategi keberlanjutan jangka panjang. Beberapa contoh konkret pelaksanaan CSR di antaranya mencakup penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, upaya pelestarian lingkungan, hingga pembangunan fasilitas sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, CSR tidak dapat dipandang hanya sebagai strategi pemasaran perusahaan. Lebih dari itu, CSR merupakan perwujudan tanggung jawab korporasi dalam menjalin relasi yang berkelanjutan dan harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi elemen kunci dalam membangun legitimasi sosial atas keberadaan dan operasional perusahaan di tengah masyarakat.

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Dila Putri Yuliana, Hidayatul Fadillah Giawa, Tengku Resti (Nuraini, 2014)	Analisis Pengungkapan Sosial dalam Laporan Keberlanjutan di PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Periode 2022-2023	Kuantitatif deskriptif	Penelitian ini menyajikan evaluasi yang kuat dan relevan atas pengungkapan sosial PTBA dalam laporan keberlanjutan. Metodologinya sistematis, hasilnya konkret, dan temuan menunjukkan ruang peningkatan khususnya pada aspek sosial masyarakat. Penelitian ini

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				bermanfaat sebagai referensi akademik dan praktik dalam pengembangan pelaporan keberlanjutan di sektor pertambangan.
2	Yani Febriawaningsih, Yanti, Trias Arimurti (Nabil & Dwiridotjahjono, 2024)	Pengaruh Leverage, Good Corporate Governance dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Pengungkapan Sustainability Report: Studi Kasus pada Industri Pertambangan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.	Kuantitatif deskriptif	Penelitian menunjukkan bahwa Leverage memiliki efek positif yang signifikan pada pengungkapan laporan keberlanjutan, menegaskan hipotesis bahwa leverage yang lebih tinggi mengarah pada peningkatan pelaporan. Good Corporate Governance (GCG) juga menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, menunjukkan bahwa praktik tata kelola yang efektif meningkatkan transparansi.
3	Ita Rahayu, Ginanjar Adi Nugraha, Tunggul Priyatama (Manajemen et al., 2024)	Pengungkapan Sustainability Report Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan: Studi Empiris Perusahaan Pertambangan Di Bei 2021-2023.	Kuantitatif asosiatif	Pengungkapan laporan keberlanjutan secara positif mempengaruhi kinerja keuangan, secara khusus diukur dengan Return on Equity (ROE) dan Return on Assets (ROA) di perusahaan yang

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023
4	Sherly Amalia Rahmah, Nur Ainiyah, Nurdiana Fitri Isnaini (Rahmah et al., 2024)	Pengaruh Pengungkapan Kinerja Lingkungan, Kinerja Sosial dan Kinerja Ekonomi terhadap Nilai Perusahaan pada Sektor Pertambangan dan Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2023.	Kuantitatif	Kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi masing-masing memiliki efek positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Pengungkapan laporan keberlanjutan diukur menggunakan indeks GRI G4, sedangkan nilai perusahaan dinilai melalui Market to Book Value
5	Dissa Elvaretta, Vira Maulina, Tika Arizona Febriani, Dita Maretha Rissi (Studi & Sektor, 2024)	Pengaruh Penerapan Green Accounting Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada Sektor Pertambangan).		Green Accounting memiliki efek positif dan signifikan pada profitabilitas, menunjukkan bahwa implementasinya dapat meningkatkan kinerja keuangan di perusahaan.
6	Ika Makherta Sutadji, Wiwik Saraswati, Nina Indriastuty (Balikpapan et al., 2024)	Analisis Komparatif Laporan Keberlanjutan Perusahaan Pertambangan Pada Kategori Ekonomi (Seri 200) Sesuai Standar Global Reporting Initiative.	Kualitatif deskriptif	CSR semakin dipandang sebagai kebutuhan strategis bagi perusahaan, didorong oleh tekanan internal dan eksternal untuk terlibat dalam praktik yang bertanggung jawab secara sosial. Studi ini berfokus pada aspek ekonomi

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				pelaporan keberlanjutan, khususnya dalam sektor pertambangan, menggunakan standar Global Reporting Initiative (GRI) sebagai kerangka kerja.
7	Nuraini Sari(Nuraini, 2014)	Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility Berdasarkan Global Reporting Initiatives (GRI): Studi Kasus Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk dan Timah (Persero) Tbk	Studi literatur kualitatif dengan analisis konten menggunakan skala Likert	PTBA dan TINS telah menerapkan pelaporan CSR berdasarkan standar GRI G3.1 dengan baik, namun masih perlu peningkatan pada kualitas dan kelengkapan isi laporan, terutama pada aspek lingkungan dan sosial. Meski kuantitas pengungkapannya tinggi, kedalaman atau rincian informasi masih kurang.
8	Peter Lim Pratama, Paulina Permatasari (Pratama & Permatasari , 2024)	Analisis Kesesuaian Pengungkapan Aspek Emisi Karbon pada Industri Pertambangan Batubara berdasarkan GRI Standards pada Laporan Keberlanjutan Tahun 2020-2022.	Kualitatif dan Kuantitatif	Penelitian ini berfokus pada pengungkapan aspek emisi oleh perusahaan batubara dalam laporan keberlanjutan mereka, secara khusus menilai kepatuhan dengan persyaratan GRI 305. GRI 305 menguraikan persyaratan khusus untuk perusahaan, termasuk emisi gas rumah kaca langsung dan tidak langsung,

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				intensitas emisi, dan upaya untuk mengurangi emisi
9	Martha Suhardiyah, Khusnul Khotimah, Subakir (Suhardiyah, 2018)	Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015	Kuantitatif	Kinerja ekonomi dan lingkungan secara positif mempengaruhi kinerja keuangan. Kinerja sosial tidak secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan. Laporan keberlanjutan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi bagi para pemangku kepentingan.
10	Intihanah, Satira Yusuf, Lilistiani Putri (Perusahaan & Pertambangan, 2023)	Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan		Penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berdampak pada nilai perusahaan. Hal ini dikaitkan dengan fakta bahwa pengungkapan CSR masih jauh dari mencakup semua komponen yang diuraikan dalam standar GRI-G4, dan CSR belum dianggap sebagai praktik wajib

Sumber: Data Diolah Kembali

2.5. Standar yang Digunakan

Penelitian tentang laporan keberlanjutan di Indonesia memakai dua acuan utama. Pertama, Global Reporting Initiative (GRI). Kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No.51/POJK.03/2017. GRI adalah standar internasional yang bersifat sukarela. Perusahaan bebas memilih untuk memakainya maupun tidak. Tujuan GRI adalah membantu perusahaan melaporkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terbuka. Namun tidak ada sanksi jika perusahaan tidak melakukannya. Penelitian (Sari,

2014) menemukan bahwa PT Bukit Asam Tbk dan PT Timah Tbk sudah melaporkan indikator GRI G3.1. Namun, bagian lingkungan dan sosial masih kurang detail. Penelitian Pratama & Permatasari (2024) juga menemukan bahwa perusahaan batubara belum memenuhi indikator GRI 305 tentang emisi gas rumah kaca. Artinya, data yang dilaporkan belum lengkap dan belum seimbang antar perusahaan.

Berbeda dengan GRI, POJK No.51/POJK.03/2017 bersifat wajib. Setiap lembaga keuangan, emiten, dan perusahaan publik harus membuat laporan keberlanjutan setiap tahun. POJK menilai kepatuhan perusahaan terhadap aturan nasional. Aturan ini mewajibkan perusahaan menjelaskan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan.

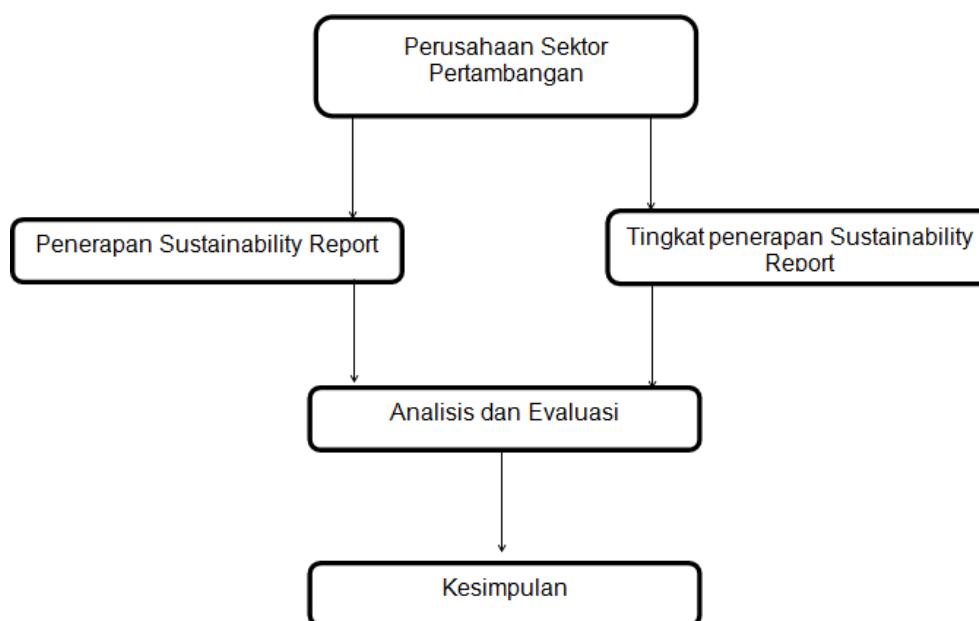
Perusahaan juga harus menunjukkan kebijakan, strategi, dan dampak kegiatan terhadap masyarakat dan lingkungan. Karena sifatnya wajib, laporan ini punya kekuatan hukum dan dipakai pemerintah untuk mengawasi praktik bisnis berkelanjutan.

Penelitian Puyo (2024) menunjukkan hasil positif setelah POJK diterapkan. PT Aneka Tambang Tbk mengalami peningkatan skor pengungkapan laporan keberlanjutan, meskipun masih ada beberapa indikator lingkungan yang belum lengkap. Penelitian ini memilih standar POJK No.51/POJK.03/2017 karena tiga alasan. Pertama,

aturan ini wajib dan punya dasar hukum yang jelas. Kedua, POJK menilai tingkat kepatuhan, bukan sekedar kesukarelaan seperti GRI. Ketiga, POJK lebih sesuai dengan kondisi industri di Indonesia, terutama sektor pertambangan yang berdampak besar pada ekonomi dan lingkungan.

Melalui standar ini, penelitian ingin menunjukkan seberapa jauh perusahaan pertambangan mematuhi aturan nasional dan berkontribusi pada praktik bisnis berkelanjutan di Indonesia.

2.6 Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Sumber: Data Diolah Penulis

Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir yang menggambarkan alur analisis sistematis terkait penerapan *Sustainability Report* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2024. Sektor ini dipilih

karena dampaknya yang besar terhadap lingkungan dan sosial, sehingga pelaporan keberlanjutan menjadi sangat penting. Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator dalam POJK No. 51/POJK.03/2017, dengan pemberian skor 1 untuk indikator yang diungkapkan dan 0 jika tidak. Data dianalisis secara kuantitatif menggunakan metode content analysis untuk menghasilkan indeks kepatuhan yang diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkat pengungkapan. Hasilnya menunjukkan tingkat penerapan *Sustainability Report* serta kesiapan perusahaan dalam menghadapi isu keberlanjutan. Kerangka ini mendukung pendekatan kuantitatif eksplorasi yang memberikan gambaran menyeluruh dan terukur atas praktik pelaporan keberlanjutan di industri pertambangan Indonesia.